**KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI**
**http://kliping.dpr.go.id**

**Judul** : Lanjutkan reformasi parlemen,Fahri: keseimbangan hakikat demokrasi
**Tanggal** : Senin, 30 September 2019
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 7

## Lanjutkan Reformasi Parlemen

# Fahri: Keseimbangan Hakikat Demokrasi

BEBERAPA hari sebelum akhir masa jabatannya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meluncurkan dua buah buku. Kedua buku berjudul 'Arahan Baru Pemberantasan Korupsi' dan 'Daulat Rakyat' yang merupakan salah satu upaya untuk menapakkan jejak sejarah perjalan reformasi parlemen di Indonesia.

"Buku ini ditulis dalam konteks besar konsolidasi demokrasi, ancaman yang dihadapi, serta munculnya kebutuhan global akan reformasi parlemen diberbagai belahan dunia. Semoga buku ini dapat menjadi bagian dari jejak sejarah memperkuat daulat rakyat dan menjaga demokrasi Indonesia," ujar Fahri di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, akhir pekan lalu.

Fahri menjelaskan, hakikat demokrasi adalah keseimbangan, beserta upaya-upaya untuk mewujudkannya. Karena itu, lanjut dia, ketika ada satu institusi demokrasi yang memiliki kekuasaan berlebih, demokrasi akan berjuang untuk menghadirkan institusi lain yang mampu mengimbangi atau mengontrolnya.

"Ketika institusi penyeimbang berubah menjadi kuat, dibutuhkan mekanisme lain untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan. Reformasi parlemen adalah upaya memperbaiki diri dan memperkuat kelembagaan agar dapat menjalankan wewenangnya secara benar," jelas politisi dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan, reformasi parlemen akan semakin bermakna ketika masyarakat semakin terbuka dan aktif berpartisipasi. Parlemen juga harus memiliki daya tampung aspirasi masyarakat dengan kapasitas yang terus membesar, mengundang warga negara untuk melakukan pengawasan atas kinerja anggotanya.

Sebab, lanjut dia, kinerja anggota parlemen yang optimal akan membantu warga negara dalam mendapatkan haknya secara wajar dari eksekutif.

"Daulat rakyat tercermin dalam sistem perwakilan yang kita anut. Daulat rakyat dihimpun secara institusional dalam kerangka demokrasi. Tingginya posisi daulat rakyat perlu dihadirkan dalam artefak-artefak budaya politik," papar dia. ■ ONI